

ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN USAHA TANI DI DESA MATARAH KECAMATAN DUSUN TIMUR KABUPATEN BARITO TIMUR

Budi Setiawati)*, Ahmad Farhani)*
budisetiawati16@gmail.com
farhaniahmad96@yahoo.com

Departemen Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
Jl. Komplek Stadion Olah Raga Saraba Kawa Pembataan Tanjung-Tabalong
Kode Pos 70123 Telp./Fax (0526) 2022484

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani di Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, serta untuk mengetahui dan menganalisis Faktor yang menghambat Kinerja Pemerintah Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani di Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data, melalui wawancara dan dokumentasi. Informan kunci meliputi PJ Kepala Desa, Kepala Urusan Pemerintahan dan Pembangunan, Ketua BPD, dan dua orang masyarakat. Teknik analisis data model interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Kinerja Pemerintah Desa Matarah kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani selama ini sudah berjalan dengan baik, berdasarkan indikator-indikator: Produktivitas, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas. Faktor yang menghambat Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani ialah: Faktor Internal; Kurangnya kemampuan SDM Pemerintah Desa, kenaikan harga material. Faktor Eksternal; Kurangnya partisipasi masyarakat, adanya masyarakat yang tidak mendukung pembangunan infrastruktur jalan usaha tani.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada Pemerintah Desa, dan masyarakat Perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan berupa peningkatan kemampuan SDM aparat Pemerintah Desa, Pemerintah Desa perlu mengadakan sosialisasi lebih dalam lagi untuk memberikan pemahaman tentang pola pemikiran masyarakat yaitu, perlunya mendukung pembangunan jalan usaha tani ini guna kesejahteraan masyarakat itu sendiri, Untuk masyarakat perlu kesadaran dari diri sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur jalan usaha tani, untuk tercapainya sebuah kemajuan.

Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Desa, Pembangunan Infrastruktur



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

***ANALYSIS PERFORMANCE GOVERNMENT OF THE VILLAGE
FOR THE CONSTRUCTION OF ROAD INFRASTRUCTURE
FARMER IN THE VILLAGE OF DUSUN MATARAH EAST BARITO
REGENCY EAST***

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the performance Government of the village for the construction of road infrastructure Farmer in the village of Dusun Matarah East Barito Regency East. as well as to know and analyze the factors that hamper the performance Government of the village for the construction of road infrastructure Farmer in the village of Dusun Matarah East Barito Regency East. This study used a qualitative research approach is descriptive in nature. Techniques of data collection, through interviews and documentation. Key informants include PJ village chief, head of Government Affairs and development, Chairman of the BPD, and two communities. Interactive model of data analysis techniques belonging.

The results of this study showed that the Government's Performance, the village of Dusun Matarah East Barito Regency East in the construction of road infrastructure Farmer during this already well underway, based on indicators: productivity, Responsiveness, Corporate Responsibility, Accountability. Factors that hinder the performance of the Government in the development of road infrastructure Village Farmer is: Internal factors; The lack of ability of Government HR village, the rising prices of materials. External Factors; The lack of participation of the community, the existence of a society that does not support the construction of road infrastructure farmer.

Based on the research results, it is recommended to the Government of the village, and the public needs to be done coaching and training in the form of an increase in the ability of the Government apparatus HR village, The village government need to hold more socialization to provide insight into the mindset of the community, namely, the need to support the development of this farmer road to the welfare of society itself, to community need awareness of yourself to participate in the construction of road infrastructure, for achievement of a farmer a progress.

Keywords : The Government's Performance; The Village; The Construction Of Infrastructure

Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

PENDAHULUAN

Menurut Lembaga Administasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) dalam Pasolong (2014) merumuskan kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Konsep kinerja yang dikemukakan oleh LAN-RI lebih mengarahkan kepada acuan kinerja suatu organisasi publik, yang cukup relevan sesuai dengan strategi suatu organisasi yakni dengan misi dan visi yang lain yang ingin dicapai.

Pembangunan infrastruktur wilayah pedesaan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana, untuk memberdayakan masyarakat serta upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa merupakan unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 1, jelas mengatakan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas melaksanakan Pembangunan Desa. Kewenangan Desa meliputi kewenangan bidang pelaksanaan Pembangunan Desa (UU RI No.6 Tahun 2014 pasal 18), dalam ketentuan tersebut desa dituntut untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam pembangunan Desa.

Siagian (2003), mendefinisikan bahwa pembangunan desa adalah keseluruhan dari proses yang berupa rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa.

Keterlibatan aparat Pemerintah Desa dengan mengikutsertakan masyarakat memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan kesejahteraan, pemerintah desa harus mampu menggerakkan dan mengarahkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat demi tercapainya pembangunan yang mensejahterakan masyarakat. Peranan kepemimpinan Pemerintah Desa sangat dituntut dalam menjalankan tugasnya di bidang masing-masing agar lebih profesional, terampil dan berdedikasi tinggi dalam rangka pencapain kinerja pembangunan.



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa harus menunjukkan kinerja sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai di daerah pedesaan. Pembangunan yang sangat diprioritaskan dalam pembangunan pedesaan adalah pembangunan fisik atau infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama di Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur salah satunya ialah Jalan Usaha Tani, karena mayoritas masyarakat kebanyakan ialah petani dan mereka sangat menggantungkan hidupnya dari bertani.

Jarak tempuh ke perkebunan dan berbagai usaha tani lainnya sangat jauh dan kebanyakan waktu dihabiskan untuk berjalan kaki saja, bukannya untuk mereka berusaha guna memenuhi kebutuhan hidup mereka, masyarakat setempat sangat memperhatikan dengan kondisi jalan usaha tani yang demikian.

Masyarakat sangat memerlukan pembangunan jalan usaha tani yang layak dari pemerintah, untuk di lalui sehingga dengan adanya sarana yang baik dapat membantu memperbaiki perekonomian masyarakat.

Namun kenyataannya sampai saat ini pembangunan jalan usaha tani yang dibuat Pemerintah Desa hanya sebagian yang optimal sehingga sebagian masyarakat mengatakan jalan usaha tani tersebut belum optimal, masyarakat masih mengeluhkan karena

akses jalan usaha tani ini sangat tidak memadai, jika hujan lebat kondisi jalan licin dan sangat rusak parah. Kendaraan bermotor tidak bisa melalui jalan tersebut sehingga hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki.

Organisasi pelayanan publik oleh Pemerintah Desa pada bidang pembangunan infrastruktur sekarang ini dituntut untuk lebih transparan dalam mengemban tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya kepada publik. Penilaian terhadap kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Birokrasi yang memiliki kinerja buruk dalam memberikan pelayanan kepada publik akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan daya saing suatu negara pada era global.

Tidak itu saja berdasarkan informasi awal peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa Kinerja Pemerintah Desa khususnya pada Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani di Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur sendiri masih kurang, terlihat dari pembangunan infrastruktur jalan usaha tani yang belum selesai dikerjakan, kemudian diminta oleh masyarakat untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan usaha tani tersebut, tetapi Pemerintah Desa

Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

tidak terlalu merespon aspirasi yang masyarakat sampaikan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi sejauh mana:

“Analisis Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani di Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur”.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Paradigma Administrasi Publik

1. Old Public Administration (OPA)

The Old Public Administration pertama kali dikemukakan oleh seorang Presiden AS dan juga merupakan Guru Besar Ilmu politik, Woodrow Wilson. Beliau menyatakan bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis. Maka dari itu munculah konsep ini, konsep *Old Public Administration* ini memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan, dimana dalam pelaksanaannya ini dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan. Ada dua kunci dalam memahami OPA ini, pertama, adanya perbedaan yang jelas antara politik (*policy*) dengan administrasi. Kedua, perhatian untuk membuat struktur dan strategi pengelolaannya hak organisasi publik diberikan kepada manajernya (pemimpin),

agar tugas-tugas dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

2. New Public Management (NPM)

Paradigma *Reinventing Government* juga dikenal sebagai *New Public Management (NPM)* dan menjadi begitu populer ketika prinsip “*Good Government*” diimplementasikan. Paradigma NPM melihat bahwa paradigma manajemen terdahulu kurang efektif dalam memecahkan masalah dalam memberikan pelayanan kepada publik.

NPM secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin lain untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas kinerja pelayanan publik pada demokrasi modern. NPM ini telah mengalami berbagai perubahan orientasi menurut Keban dalam Pasolong (2014), yaitu:

- 1) Orientasi *The Drive* yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja.
- 2) Orientasi *Downsizing and Decentralization* yaitu mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi dan mendelagasikan otoritas kepada unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara cepat dan tepat.



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

3) Orientasi *In Search of Excellence* yaitu mengutamakan kinerja optimal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4) Orientasi *Public Service* yaitu menekankan pada kualitas, misi dan nilai-nilai yang hendak dicapai organisasi publik, memberikan perhatian yang lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan dan partisipasi “user” dan warga masyarakat, memberikan otoritas yang lebih tinggi kepada pejabat yang dipilih masyarakat, termasuk wakil-wakil mereka, menekankan “*Social learning*”.

3. New Public Service (NPS)

Menurut Denhardt dalam Pasolong (2014), menyatakan NPS lebih diarahkan pada *democracy, pride and citizen* dari pada *market, competition and customers* sektor privat. Beliau menyatakan “*public servants do not deliver customers service, they deliver democracy*”. Oleh sebab itu nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan dan pelayanan untuk kepentingan publik sebagai norma mendasar lapangan administrasi publik.

Berkaitan dengan judul penelitian peneliti tentang “Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani di Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur”, kinerja Pemerintah

Desa sendiri lebih mengarah kepada paradigma administrasi publik *The New Public Management (NPM)*, dimana sudah terstrukturnya tugas setiap Pemerintah Desa Matarah, sehingga memudahkan para aparat Pemerintah Desa mengetahui alur mana yang mereka lakukan ketika mereka sedang memberikan pelayanan khususnya pada pembangunan infrastruktur.

B. Paradigma Pembangunan

Paradigma-paradigma pembangunan yang disusun oleh para teoritis dan perencanaan pembangunan tidak bisa dipungkiri lebih berputar kepada pendekatan teoritis dan keilmuan daripada sebuah kajian konseptual yang lebih mengacu kepada praktik. Hingga pertumbuhan seimbang maupun pendekatan politik kulturis, yakni yang percaya bahwa kemajuan bisa diperoleh dengan injeksi nilai-nilai maju (biasanya mengacu kepada nilai di negara maju sendiri) ataupun yang kulturis, yakni yang percaya bahwa hanya perubahan secara struktural yang bisa membuat negara berkembang menjadi maju karena yang terjadi adalah struktur yang tidak benar, bukan nilai yang tidak benar.

Pada akhirnya merupakan akumulasi pendekatan yang saling melengkapi, dan tidak perlu saling dipertentangkan. Akan tetapi pendekatan-pendekatan tersebut didalam pengembangannya dan



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

kebijakan pembangunan cenderung bersifat sektarian, atau sangat menonjolkan salah satu dan mengabaikan yang lain. Pendekatan ini cukup berbeda dengan pendekatan manajemen yang lebih bersifat memadukan seluruh pendekatan yang ada, menyusun dalam tatanan praktik dengan berusaha membuatnya tidak tumpang tindih.

Pendekatan manajemen lebih mampu mendekati permasalahan dan menemukan solusi, ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh empu manajemen Peter F. Drucker, seperti yang dikemukakan sebelumnya masyarakat modern adalah masyarakat yang telah berubah dari masyarakat paguyuban menjadi masyarakat organisasi. Melalui organisasi, masyarakat mengembangkan kompetensi dan keunggulannya untuk bersaing dengan organisasi lain didalam negara dan antar negara, dan pada akhirnya kompetisi antar negara bukan terjadi antar negara itu sendiri, melainkan antar organisasi didalam negara, yaitu organisasi publik, organisasi bisnis, dan organisasi nirlaba.

Hanya manajemen yang memungkinkan organisasi membentuk dirinya sebagai “organisasi” (bukan hanya sekedar “gerombolan orang-orang”) dan kemudian mengkreasikan nilai yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Berkaitan dengan judul penelitian peneliti tentang “Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani di Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur”. Kinerja Pemerintah Desa sendiri lebih mengarah kepada paradigma pembangunan dengan pendekatan manajemen, dimana pendekatan manajemen lebih mampu mendekati permasalahan dan menemukan solusi pada bidang pembangunan infrastruktur.

C. Konsep Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Menurut Rue & Byars dalam pasolong (2014) mengatakan bahwa kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil. Gibson dalam pasolong (2014) mengatakan bahwa kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Dikatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan ditentukan oleh interaksi antara kemampuan dan motivasi.

Menurut Widodo dalam Pasolong (2014) mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Menurut Simamora (2003) Kinerja adalah ukuran



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

keberhasilan organisasi dalam mencapai misinya. Sedangkan Shaidily (1992) mengatakan kinerja atau performance adalah berdaya guna prestasi atau hasil. Wahyudi Kumorotomo (1996) memberikan batasan pada konsep kinerja organisasi publik setidaknya berkaitan erat dengan efisiensi, efektifitas, keadilan dan daya tanggap.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian mengenai kinerja instansi pemerintah, bahwa kinerja merupakan proses pencapaian tujuan tertentu dan dalam kurun waktu tertentu, sesuai tanggungjawab masing-masing dengan batasan yang telah ditetapkan, dengan memfokuskan pada tujuan yang ingin dicapai melalui visi dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis secara jelas dan legal agar nantinya terlihat hasil kinerja yang memuaskan.

2. Pengertian Kinerja Organisasi

Chaizi Nasucha dalam Pasolong (2014) mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan

meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif.

3. Indikator Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah sangat dibutuhkan adanya indikator yang jelas oleh *stakeholders*. Guna mengemban tugas, fungsi dan tanggungjawab pemerintah desa harus lebih mengedepankan pelayanannya terhadap program pembangunan infrastruktur karena akan dilihat nantinya sejauh mana kinerja dan hasil yang sudah dicapai oleh Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani di Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur.

Agus Dwiyanto, dalam Pasolong (2014) menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:

a. Produktivitas

Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output*. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO)



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

mencoba mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting dijadikan tolak ukur dalam menjalankan tugasnya tanpa mengindahkan prosedur yang telah ditetapkan. Yang ingin dilihat dari indikator produktivitas jika dikaitkan dengan penelitian ini adalah bagaimana Kinerja Pemerintah Desa dalam kemampuan menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani di Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur.

b. Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan

indikator kinerja organisasi publik.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat yang secara otomatis kinerja organisasi tersebut jelek. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi mewujudkan misi dan tujuan organisasi. Yang ingin dilihat dari indikator responsivitas ini yaitu kemampuan dalam menerima dan merealisasikan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani di Desa



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur.

d. **Responsibilitas**

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit, Lenvine dalam Dwiyanto (2006). Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas, yang ingin dilihat dalam penelitian ini melalui indikator responsibilitas adalah bagaimana Tanggungjawab Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani di Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur.

e. **Akuntabilitas**

Akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi

publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Yang ingin dilihat dari indikator akuntabilitas melalui penelitian ini adalah menyangkut bagaimana pembuatan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani di Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur.

Dari kelima indikator tersebut peneliti memilih untuk menggunakan empat indikator saja yaitu Produktivitas, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Keempat indikator ini dipilih karena alasan bahwa indikator-indikator ini dirasa telah mewakili dari beberapa indikator yang banyak digunakan, untuk menilai kinerja suatu organisasi publik yaitu Pemerintah Desa dari dalam dan luar organisasi, dan juga hanya indikator ini saja yang sesuai saat peneliti melakukan penelitian dilapangan.

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak organisasi pemerintah untuk



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

melayani masyarakat di Pedesaan dalam proses meningkatkan pembangunan infrastruktur.

Diharapkan nantinya mampu membangun pembangunan berkualitas melalui program pembangunan infrastruktur agar mampu mewujudkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang jauh lebih baik. Seperti yang diharapkan masyarakat Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur.

Pada dasarnya, desa merupakan awal bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum negara modern ini terbentuk, kesatuan sosial sejenis desa atau masyarakat adat telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Mereka ini merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar kuat serta relatif mandiri dari campur tangan kekuasaan dari luar (Santoso, 2003).

D. Konsep Pemerintah Desa

1. Pengertian Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa : Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2. Kepemimpinan Pemerintah Desa

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang berarti seseorang yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan dalam satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas demi tercapainya suatu maksud dan beberapa tujuan.(Kartono, 2005)

Gary Yuki dalam Pasolong (2014) mengatakan bahwa kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi, yang mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa bagi para pengikut, pilihan dari sasaran-sasaran bagi kelompok atau



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

organisasi, pengorganisasian dari aktivitas-aktivitas kerja untuk mencapai sasaran, pemeliharaan hubungan kerjasama dan teamwork, serta perolehan dukungan dan kerjasama dari orang-orang yang berada diluar kelompok atau organisasi.

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain dalam melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atau kata lain mengatakan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Tugas pokok Pemerintah Desa adalah menjalankan sebagian kewenangan kecamatan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasar kepada peraturan yang berlaku. Dalam kapasitasnya

sebagai sebuah organisasi pemerintah dibawah Kecamatan, tujuan penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah terlaksananya berbagai fungsi kantor desa sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh kecamatan secara efektif dan efisien, termasuk didalamnya adalah fungsi pelayanan pada bidang pembangunan oleh aparat Pemerintah Desa kepada masyarakat.

Aparat Pemerintah Desa dituntut untuk dapat menunjukkan kinerjanya melalui tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pemerintah Desa, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga akan lebih memahami keadaan dan kondisi masyarakat.

E. Pembangunan Infrastruktur

Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, Effendi (2002) menyebutkan bahwa pentingnya Pembangunan Infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

agar para investor mau menanamkan modalnya di daerah, apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk penanaman modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif.

Secara spesifik oleh Stone (dalam Kodoatie 2005), Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitas tujuan-tujuan ekonomi.

Pembangunan Infrastruktur Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian adalah metode penelitian kualitatif. Sugiyono dalam Pasolong (2014) Menjelaskan penelitian

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini, penelitian kualitatif bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan dan mencoba untuk menggambarkan suatu fenomena secara lebih mendalam mengenai Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani di Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Jadi penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya secara objektif.

B. Jenis dan Sumber Data



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer yaitu sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui

sumber pertama (responden atau informan, melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini, peneliti berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data. Ia memanfaatkan data yang telah dikumpulkan pihak lain. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Kaur Pemerintahan dan Pembangunan, Ketua BPD, dan Masyarakat.

C. Teknik Analisa Data

Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) didalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pembahasan Indikator-indikator Kinerja

1. Produktivitas

Produktivitas dipahami sebagai rasio antara input dan output, artinya perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan dengan hasil yang diperolehnya dalam periode tertentu.

Berdasarkan penelitian di lapangan dan didukung oleh observasi saya, dapat dianalisa bahwa Kinerja Pemerintah Desa tentang kemampuan Pemerintah Desa dalam menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani, bahwa Pemerintah Desa sudah menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan usaha tani, dan dalam penyelesaiannya sudah selesai seperti waktu yang telah ditentukan. Dan sudah dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sudah sesuai seperti yang diharapkan masyarakat, dengan artian bahwa sudah optimal atau berjalan dengan baik.

2. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik dibidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan usaha tani.

Konsep responsivitas dalam penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara langsung kemampuan dari Pemerintah Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur dalam hal menerima dan merealisasikan aspirasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan usaha tani.

Berdasarkan penelitian di lapangan dan didukung oleh observasi saya, dapat dianalisa bahwa Pemerintah Desa sudah baik menyikapi aspirasi masyarakat, hanya saja tidak semua aspirasi dapat terealisasikan. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Desa memilih pembangunan mana yang lebih diprioritaskan.

3. Responsibilitas

Menurut Lenvine (1990) dalam Dwiyanto (2008). Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

Berdasarkan penelitian di lapangan dan didukung oleh observasi saya, dapat dianalisa mengenai bagaimana

Tanggungjawab Pemerintah Desa dalam proses pembangunan infrastruktur jalan Usaha Tani. Tanggungjawab Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan usaha tani dan sosialisasi sudah sesuai seperti apa yang diharapkan masyarakat, Pemerintah Desa sudah transparan dalam pembangunan infrastruktur.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan kinerja dengan petunjuk pelaksana yang menjadi dasar atau pedoman penyelenggaraan kinerja pelayanan publik dalam bidang pembangunan infrastruktur kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas Pemerintah desa didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kinerja pelayanan publik dalam pembangunan infrastruktur jalan usaha tani di Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, yaitu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur jalan usaha tani tersebut.



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Berdasarkan penelitian di lapangan dan didukung oleh observasi saya, dapat dianalisa bahwa melalui indikator kinerja akuntabilitas Pemerintah Desa sudah menyampaikan tepat waktu. Dan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban memang adanya kendala, namun hal tersebut dapat diatasi. Jadi dapat dikatakan akuntabilitas Pemerintah Desa sudah berjalan dengan baik.

B. Pembahasan Faktor Penghambat.

1. Hambatan Internal (dari dalam)

Berdasarkan penelitian di lapangan dan didukung oleh observasi saya dapat dianalisa bahwa faktor penghambat internal ialah:

- a. Kurangnya kemampuan SDM Pemerintah Desa.
- b. Terjadinya kenaikan harga material, sehingga tidak sesuai dengan perencanaan awal dan anggaran yang telah ada jadi tidak mencukupi

2. Hambatan eksternal (dari luar)

Berdasarkan penelitian di lapangan dan didukung oleh observasi saya, dapat dianalisa bahwa faktor penghambat yaitu:

- a. Kurangnya partisipasi dari sebagian masyarakat karena rendahnya tingkat kesadaran.
- b. Adanya masyarakat yang tidak mendukung pembangunan infrastruktur jalan usaha

tani ini, karena sebagian masyarakat tidak menerima inovasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Kinerja Pemerintah Desa Matarah kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani selama ini sudah berjalan dengan baik, berdasarkan indikator-indikator: Produktivitas, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas.
2. Faktor yang menghambat Kinerja Pemerintah Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani adalah: Faktor Internal; Kurangnya kemampuan SDM Pemerintah Desa, kenaikan harga material. Faktor Eksternal; Kurangnya partisipasi masyarakat, adanya masyarakat yang tidak mendukung pembangunan infrastruktur jalan usaha tani.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. d. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi, B. (2002). *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, Uhaindo Media dan Offset.



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

- Harbani, P. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Harbani, P. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Irwantoto, A. (2014). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Banua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu). <http://jurnafis.untan.ac.id>.
- Kartono, K. (2005). *Kepemimpinan : Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu ?* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kodoatie, R. J. (2005). *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Komorotomo, d. (2005). *Anggaran Berbasis Kinerja, Konsep & Aplikasinya*. Yogyakarta: MAP UGM.
- Margono S., D. (2007). *Meteorologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Miles, M. B. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UL-press.
- Rosalina, M. (2013). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus Di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau). <http://ejournal.pin.or.id>.
- Santoso, P. (2003). *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shadily, H. (1991). *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian, S. P. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2005). *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simamora, B. (2003). *Penilaian Kinerja Dalam Manajemen Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Dokumen

- Matarah, Desa. 2016. *Perdes dan RPJM Desa Tahun 2016-2021*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Profil Desa Matarah Tahun 2017